

BAB II

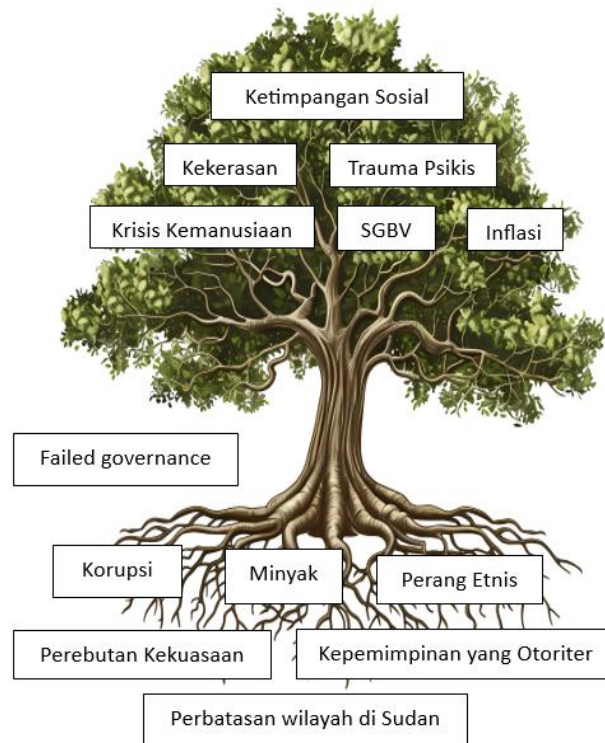
IMPLEMENTASI *UNITED NATIONS MISSION IN SOUTH SUDAN* DALAM MENANGANI *SEXUAL AND GENDER BASED ON VIOLENCE*

Bab II menjelaskan permasalahan yang terjadi di Sudan Selatan dengan tujuan memahami dinamika pertikaian yang berasal dari berbagai konteks termasuk pengaruh *gender roles* dalam kehidupan. Bagian pertama membahas latar belakang terjadinya konflik SGBV berdasarkan faktor-faktor pemicunya, dan dampak sosiokultural ke gender hingga menjadi sebuah budaya impunitas. Bagian kedua membahas mengenai peran UNMISS sebagai organisasi internasional. Bagian terakhir membahas agenda *Women, Peace and Security* (WPS) dalam melaksanakan *Action for Peacekeeping* di Sudan Selatan.

2.1. Keadaan Sudan Selatan

Dalam menganalisis kondisi Sudan Selatan pada penelitian segitiga konflik, maka membutuhkan pembahasan yang menjelaskan unsur C (*Contradiction*) menurut Johan Galtung berdasarkan *Roots of Conflict* yang dapat digunakan untuk memahami struktur permasalahan berdasarkan pemahaman tentang konflik melalui konsep-konsep yang berfokus pada akar penyebab dan dinamikanya.

Gambar 2.1. *Roots of Conflict in South Sudan*



Sumber: Diolah oleh penulis dan bersumber dari GALTUNG (2015)

Dalam hal ini, konteks permasalahan di Sudan Selatan bersumber dari adanya unsur *failed governance* karena persaingan yang sifatnya berkelompok untuk mengendalikan kekuasaan dan sumber daya yang dimiliki. Manusia adalah aktor rasional yang membuat keputusan rasional termasuk terkait dengan keterlibatan konflik manusia. Schelling memandang konflik dalam saling ketergantungannya dengan kerja sama dan persaingan di antara berbagai aktor. Sehingga, konflik terjadi ketika tujuan, sasaran, kebutuhan, atau nilai kelompok yang bersaing berbenturan dan agresi (Sikoaska & Solomon, 1999). Dalam masyarakat Sudan Selatan yang beragam secara etnis mengklaim bahwa kekuasaan atas berbagai isu seperti politik, sumber daya alam, kebijakan wilayah, dan masing-masing isu ini

berpotensi menjadi fokus utama permainan kekuasaan oleh kelompok etnis yang bersaing.

Sudan terhambat dalam mengupayakan pemerintahan demokratis pasca kejatuhan Presiden Omar Hasan Ahmad al-Bashir karena perebutan kekuasaan yang menyebabkan munculnya kekerasan dan persaingan yang menggambarkan kegagalan sistem pemerintahan dilatar belakangi oleh:

1. Konflik Persaingan Internal

Salva Kiir dan Riek Machar berhasil memenangkan pemilu yang diselenggarakan oleh Dewan Legislatif Sudan Selatan pada bulan April 2010 dengan memenangkan 160 kursi (El-Sadany & Ottaway, 2012). Namun, seiring berjalannya waktu ditemukannya perbedaan pandangan politik diantara keduanya ditambah dengan kenyataan bahwa etnis Dinka lebih dominan dalam SPLM yang memicu ketidakadilan sistem pemerintahan, sehingga SPLM selaku partai politik yang berkuasa terdiri dari etnis Dinka dan Nuer terpecah untuk memperebutkan kekuasaan. Alhasil, perundingan CPA 2005 yang mengupayakan kemerdekaan di Sudan Selatan pada tahun 2011 tidak berlangsung lama. Berbagai kritik diserukan kepada Kiir yang dianggap terlalu otoriter dalam memimpin negara yang baru merdeka, oleh karenanya Machar menantang Kiir dalam kepemimpinannya di SPLM dengan mencalonkan diri sebagai presiden dari partai tersebut pada pemilu tahun 2015 (Sikainga et al., 2025).

Pemicu terjadinya perang saudara di Sudan Selatan karena pertikaian politik antara Presiden Salva Kiir yang menuduh Wakil Presiden Riek Machar melakukan

kudeta, sehingga pertempuran antara dua faksi pasukan pemerintah melibatkan dua kelompok etnis yang berbeda (South Sudan Crisis Facts - Conflict in South Sudan, 2019). Machar memimpin pasukan pemberontak yaitu SPLA dalam oposisi untuk menyerukan kemunduran Kiir, dengan begitu Kiir mengaitkan tindakan tersebut sebagai bagian dari upaya kudeta yang dipimpin oleh Machar. Ketegangan terjadi semakin intensif yang membuat kekerasan menyebar ke penduduk sipil memberikan dampak tuduhan ke kedua belah pihak melakukan pelanggaran hak asasi manusia (Sikainga et al., 2025)).

Jurnal *Epidemiol Community Health* mengidentifikasi intervensi sosial dari kekerasan di Sudan Selatan selain didefinisikan adanya serangan fisik tetapi juga ancaman kekuasaan terhadap suatu etnis atau komunitas. “*New War*” menggambarkan konflik di mana batas-batas antara perang, kejahatan terorganisir, dan pelanggaran hak asasi manusia berskala luas menjadi sulit untuk diadili (Rutherford et al, 2007). Berkaca dari tenaga polisi yang digunakan selama kampanye Referendum oleh SPLA untuk menangkap dan melecehkan aktivis pro-persatuan wilayah. Selain itu, konteks “*New War*” Sudan Selatan dilihat saat Ketua Dewan Perdamaian dan Persatuan ditangkap setibanya di Bandara Juba, serta penangkapan anggota *National Congress Party* (NCP) di Jonglei, Khatulistiwa Timur dan Barat serta Bahr el Ghazal Barat yang terjadi sebelum pemungutan suara dan pada saat pemungutan suara. Intimidasi yang terdokumentasi terhadap NCP anggota di Jonglei tersebut mewakili pelanggaran negara dalam jaminan atas kebebasan berserikat dan berekspresi. Saat terisolasi insiden tersebut juga mengakibatkan hilangnya nyawa di Kordofan Selatan dan negara bagian Unity

seperti di Abyei, insiden-insiden ini mengurangi kondisi keamanan yang secara umum baik situasi di Sudan Selatan, sebelum, selama, dan pasca-Referendum (Nedelcheva, M.,2011).

2. Perebutan Minyak

Minyak menjadi kekayaan sumber daya alam di Negara Afrika yang dapat memicu terjadinya korupsi diantara sebagian besar penjabat pemerintah negaranya, diketahui bahwa sumber daya alam ini berhasil memberikan 85% pendapatan nasional (INTERNATIONAL CRISIS GROUP, 2024). Setelah pemisahan wilayah, kemerdekaan negara menentukan bahwa $\frac{2}{3}$ kilang minyak milik Sudan menjadi berada di wilayah Sudan Selatan begitupun dengan ladang minyak. Kasus tersebut membuat pemerintah lebih bergantung dengan pendapatan minyak daripada pajak warga negaranya sendiri, sehingga masyarakat cenderung kurang diperhatikan. Perusahaan milik Sudan Selatan adalah *Petro Energy dan Greater Nile Petroleum Operating Company* (GNPOC), *White Nile Petroleum Operating Company* (WNPOC)/ Thar Jath, Petrodar, sedangkan Perusahaan Sudan hanya GNPOC dan *Petro Energy*. Sudan Selatan disebut sebagai negara *landlocked* yang bergantung dengan pipa milik Sudan untuk mengekspor minyak melalui Port Sudan. Perjanjian pada September 2011 mengenai pembukaan beberapa penyeberangan perbatasan dengan tujuan pembagian minyak menuai kontroversial, kesepakatan uang yang harus dibayar oleh Sudan Selatan cukup tinggi untuk penggunaan jaringan pipa dan fasilitas pelabuhan Sudan demi mengangkut dan mengekspor minyaknya (Sikainga et al., 2025)).

Perselisihan terjadi saat Sudan Selatan meminta biaya yang lebih terjangkau US\$1 dan Sudan meminta US\$32 yang termasuk biaya transit, penggunaan pelabuhan, proses dan transportasi . Adapun tuduhan Sudan mencuri minyak negara yang akan diekspor seharga US\$ 815 juta dinyatakan oleh Pagan Anum kepala negosiator Sudan Selatan. Pernyataan dibantah oleh Presiden Omar Al-Bashir yang mengatakan bahwa Sudan hanya akan mengambil 23% minyak di wilayah Selatan sebagai mengganti biaya transit yang belum mencapai kesepakatan (Cahyanti, 2017). Diskusi diberlangsungkan untuk menyelesaikan masalah yang dipimpin oleh Uni Afrika dan diadakan di Addis Ababa, Ethiopia ternyata tidak berhasil dan pada bulan Januari 2012 Sudan Selatan mulai menghentikan operasi di ladang minyaknya untuk mencegah Sudan mengambil minyaknya lagi. Tindakan tersebut terbukti merugikan perekonomian kedua negara terutama Sudan Selatan yang bergantung pada pendapatan minyak untuk mendanai hampir seluruh anggaran negaranya.

Sudan Selatan ditetapkan sebagai negara baru setelah memisahkan diri dengan Sudan, tetapi kemandiriannya masih belum maksimal karena ketergantungannya akan wilayah Utara sebagai ekspor minyak pasar internasional dalam penggunaan 2 jalur pipa sebagai pengiriman minyak ke Port Sudan di Laut Merah (INTERNATIONAL CRISIS GROUP, 2024). Salah satu jalur pipa bertanggung jawab atas $\frac{2}{3}$ ekspor minyak Sudan Selatan rusak pada bulan Februari yang perbaikannya memakan waktu lama ditengah berlangsungnya konflik. Mengingat pentingnya minyak bagi perekonomian nasional, minyak mempunyai peranan penting dalam melonjaknya inflasi dan menjadi tujuan strategis yang

penting bagi para pemberontak. Sehingga, hambatan tersebut berpotensi menyebabkan ketidakstabilan ekonomi dan permasalahan baru. Dalam hal ini, *Rapid Support Forces* (RSF) memanfaatkan situasi dengan mengambil minyak mentah dan melakukan transaksi ilegal dari Juba, RSF terbukti mengalihkan minyak dari kilang minyak al-Jaili di Utara Khartoum yang merupakan hasil rebutan pada awal perang. Pipa sepanjang 1.400 km penghubung ladang minyak Cekungan Melut di negara bagian Upper Nile ke Port Sudan sebelum terjadinya kerusakan mengangkut 60% produksi minyak milik Sudan Selatan, kerusakan terjadi saat perusahaan Sudan dibawah kementerian energi Burhan yaitu Bashayer Pipeline Company (BAPCO) tidak dapat mengoperasikan solar ke Stasiun pompa yang berada dibawah kendali RSF dimana berfungsi untuk menjaga campuran minyak mentah cukup panas agar mencegah kebekuan menjadi zat seperti aspal. BAPCO menemukan adanya jaringan pipa yang tersumbat di sebelah Utara Stasiun yang mengakibatkan pekerjaan dan pengiriman 600.000 barel dihentikan. Pejabat RSF menyatakan keinginannya untuk mengalokasikan biaya transit di rekening escrow hingga perang berakhir dengan menghentikan pembayaran ke Pemerintah Burhan yang jelas ditolak oleh Sudan Armed Forces (SAF).

3. Perbatasan di Sudan

Keputusan referendum untuk menyetujui pemisahan diri pada dasarnya tidak mengatasi beberapa masalah teritorial yang penting karena pengesahan jalur perbatasan masih belum final mengenai Abyei yang harus tetap di dalam Utara atau menjadi bagian dari Selatan; dan status Kordofan Selatan dan Negara Bagian Nil

Biru wilayah yang secara jelas diakui sebagai bagian dari Utara. Hal ini menuai konflik berkepanjangan mengingat Abyei wilayah kaya minyak yang terletak di perbatasan antara Sudan dan Sudan Selatan, sehingga status wilayah yang belum jelas cukup memicu ketegangan. Untuk mengatasi pertikaian, oleh karenanya *United Nations Security Council* (UNSC) mengadopsi Resolusi 1990 pada 27 Juni 2011 yang menetapkan *United Nations Interim Security Force for Abyei* (UNISFA) demi memantau demiliterisasi wilayah tersebut. Sedangkan Kordofan Selatan dan Nil Biru adalah dua wilayah di Sudan yang memiliki populasi yang banyak beridentifikasi dengan Sudan Selatan (Cahyanti, 2017).

Kerusuhan SAF dan SPLA terjadi pada 5 Juni 2011 di Kordofan Selatan hingga meluas ke Nil Biru telah melanggar hukum humaniter internasional karena serangan yang diberikan tidak memposisikan daerah kombatan dan non kombatan di daerah pemukiman. Konflik juga terjadi akibat kemenangan Gubernur Ahmed Haroun disaat dirinya masuk dalam buronan International Criminal Court atas kejahatannya di Darfur (Afriyie et al., 2020). Sudan menyerang Abyei karena wilayah sengketa yang kaya akan minyak di antara Sudan dan Sudan Selatan akibat serangan faksi SPLA yang dipimpin oleh Abdelaziz al-Hilu di Kadugli sekitar 44 warga sipil dan 28 lainnya luka-luka dengan tujuan memerangi SAF di Nil Biru dan Kordofan Selatan sebagai bentuk unjuk rasa tuntutan kejelasan status kedua wilayah (Nugraha, 2025).

Konflik di Negara Bagian Kordofan Selatan dan Nil Biru menyebabkan pengungsian besar-besaran selama bertahun-tahun dan gangguan sosial maupun

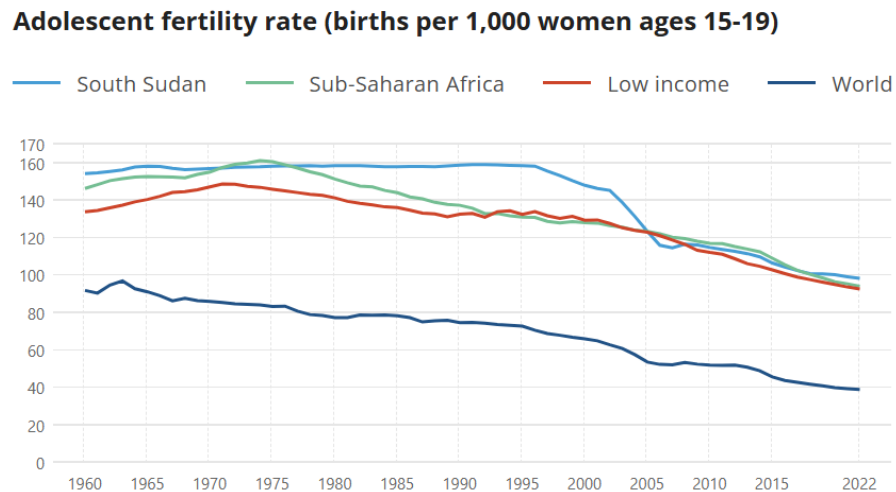
ekonomi jangka panjang terhadap populasi masyarakat setempat. Sekitar 200.000 orang mengungsi dengan keterbatasan makanan, air dan layanan kesehatan. *Human Rights International Agencies* melaporkan kerusakan yang dipicu oleh pemboman udara terus-menerus terhadap warga sipil merupakan dari pihak pemerintah. Pada bulan April 2012, SAF melakukan serangan bom di seluruh wilayah perbatasan dan SPLA telah melintasi utara dan menduduki kota Heglig (Sikainga et al., 2025).

Pemerintahan Sudan Selatan yang dipimpin oleh SPLM dan *South Sudan Opposition Alliance* (SSOA) menandatangani *Revitalised Agreement on the Resolution of Conflict in the Republic of South Sudan* (R-ARCSS) pada 2018. Penandatanganan R-ARCSS membawa kemungkinan berakhirnya kekerasan dan konflik yang meluas di Sudan Selatan dengan fokusnya ke pemulihan program pembangunan jangka panjang (Logo et al, 2022). Secara keseluruhan, status wilayah Abyei, Kordofan Selatan, dan Nil Biru masih menjadi sumber ketegangan dan konflik antara Sudan dan Sudan Selatan dengan dampak signifikan terhadap stabilitas regional dan kesejahteraan penduduk setempat.

2.1.1. *Sexual and Gender Based on Violence* di Sudan Selatan

Keadaan Sudan Selatan sebagai negara di bagian Benua Afrika tercatat memiliki konflik yang ironis. Hal ini ditunjukkan dengan jumlah data 36,1% kasus teroris yang menyebabkan 49,3% korban jiwa dan 21,4% kematian dari konflik di Timur Tengah dan Afrika Utara pada tahun 2002-2018 (Kim and Sandler, 2020). Pemberontakan terjadi akibat aspirasi ekonomi dan politik yang telah disuarakan oleh masyarakat diabaikan oleh pemerintah pusat di Sudan (CNN Indonesia, 2023).

Gambar 2.2. Angka Kelahiran Remaja Usia 15-19 Tahun



Sumber: (World Bank Group, 2025)

Berdasarkan tabel *Word Bank Group*, pada tahun 2020 angka kelahiran remaja mencapai 100,6% sebagai bentuk kasus SGBV dari dampak terjadinya konflik. Dalam hal ini, kejahatan terkait perang saudara yang sebagian besar terjadi pada masyarakat lokal perempuan terdiri dari 28% pembunuhan dan 41% penculikan dengan 18% korban kekerasan seksual. UNICEF melaporkan bahwa pernikahan dini dan pernikahan paksa sangat umum terjadi di Sudan Selatan karena 52% dari anak perempuan sudah menikah sebelum usia 18 tahun (UNICEF, 2020).

Meskipun pemerkosaan merupakan kejahatan yang harus ditangani oleh pengadilan pidana di Sudan Selatan, keluarga korban sering kali lebih memilih untuk menggunakan Pengadilan Tinggi yang seringkali mengakibatkan perempuan muda tersebut menjadi korban yang dipaksa menikahi pelaku, sehingga menjadikannya sebagai korban sebanyak dua kali. SGBV juga seringkali dikelola melalui sistem hukum adat yang mana dapat lebih fokus pada meredakan

ketegangan antar masyarakat, terutama melalui pembayaran kompensasi atau pengembalian harta curian daripada memberikan keadilan bagi seseorang. Hal ini menciptakan budaya impunitas bagi pelaku dan dapat meninggalkan keluhan penyintas SGBV dan keluarganya belum terselesaikan (Logo et al, 2022).

Kekerasan yang telah terjadi merupakan dampak perang sipil di Sudan Selatan telah memberikan pengaruh pada seluruh aspek kehidupan perempuan, termasuk kekerasan seksual, pemerkosaan, dan bentuk kekerasan berbasis gender lainnya. Persaingan dua etnis menjadi lebih tajam setelah konflik terpecah sehingga terbagi faksi militer *Sudanese Army Forces* (SAF) dan *Rapid Support Forces* (RSF) sudah dimulai semenjak masa kepemimpinan Bashir membentuk RSF untuk menumpas pemberontakan sipil di Darfur yang terjadi akibat aspirasi politik dan ekonomi yang telah disuarakan diabaikan oleh pemerintah pusat Sudan Selatan. RSF kerap disebut sebagai *Janjaweed* sebagai insiden kekejaman di Sudan (CNN Indonesia, 2023).

Gambar 2.3. Contoh Kekerasan Struktural di Sudan Selatan



Sumber: South Sudan Crisis Facts - Conflict in South Sudan, 2019

Menurut *United Nations* (UN) mayoritas penampungan populasi sebagai dampak krisis Sudan Selatan adalah 60% pengungsi wanita dan anak-anak dibawah 18 tahun. Banyak dari mereka mengalami pelecehan selama penggerebekan di rumah, ketika mereka melarikan diri atau ketika mereka meninggalkan tempat penampungan untuk mencari kebutuhan dasar. Berkaca berdasarkan laporan *Mercy Corps*, tugas-tugas untuk bertahan hidup sering dilakukan oleh perempuan dan anak perempuan di Sudan Selatan sendirian dengan kondisi mereka yang jauh dari rumah. Contoh nyata kekerasan struktural dari Amelia seorang remaja penduduk Sudan Selatan berumur 18 tahun mencari kayu sendiri untuk menanggung beban kebutuhan keluarganya yang membuatnya rentan terkena serangan (South Sudan Crisis Facts - Conflict in South Sudan, 2019).

Beberapa data *Amnesty International* dikumpulkan dari kesaksian individu yang hanya mewakili sebagian kecil dari mereka yang mengungsi akibat konflik. Oleh karena itu, laporan yang ditemukan ini hanya dapat menyajikan sebagian kecil dari realitas kekerasan terhadap perempuan dalam konteks krisis yang terjadi. Fenomena tersebut terjadi akibat pelanggaran hak asasi manusia yang secara khusus menargetkan perempuan dan anak perempuan seperti penculikan, perbudakan seksual, penyiksaan, dan pemindahan paksa. *Amnesty International* juga mengkaji bahwa konsekuensi dari kekerasan yang dilakukan terhadap perempuan di Sudan Selatan telah mencakup stigmatisasi sosial, konsekuensi terhadap hak-hak ekonomi, sosial dan kesehatan, serta kehancuran tatanan sosial masyarakat (Amnesty International, 2011). SGBV memberikan dampak berkepanjangan yang cukup serius kepada perempuan di Sudan Selatan yang terbagi ke dalam golongan:

a. Kekerasan Fisik

Di Sudan Selatan, RSF telah melakukan tindakan kekerasan seksual yang meluas di wilayah yang mereka kendalikan yaitu Khartoum, tindakan yang merupakan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Baik RSF maupun SAF telah menyerang petugas layanan kesehatan, petugas pertolongan lokal, dan fasilitas layanan kesehatan, yang merupakan kejahatan perang. Menurut *Human Rights Watch*, terdapat luka fisik, emosional, sosial, dan psikologis yang ditinggalkan para penyintas sangatlah besar. Petugas kesehatan menemui para penyintas yang mencari bantuan karena luka fisik yang melemahkan yang mereka alami selama pemerkosaan dan pemerkosaan secara berkelompok (Human Rights Watch, 2024).

Selain harus menghadapi kekejaman pasukan militer yang menysar perempuan sebagai kelemahan lawan, berdasarkan data *World Bank and Gender-Based Violence Information Management System* (GBVIMS) yang dikumpulkan, salah satu nya adalah kekerasan dalam rumah tangga di Sudan Selatan memiliki tingkat prevalensi yang tinggi. Data dari sistem menunjukkan bahwa hampir 40% perempuan mengalami kekerasan fisik atau seksual oleh pasangan mereka (World Bank South Sudan, 2023). Kekerasan menyoroti bahwa ketidakstabilan politik dan ketegangan etnis sering kali menyebabkan ketergantungan perempuan pada pasangannya, yang bisa meningkatkan kerentanannya terhadap kekerasan dalam rumah

tangga. Perempuan yang kehilangan perlindungan dari keluarga atau negara menjadi lebih rentan terhadap kekerasan oleh pasangan mereka.

Korban kekerasan secara fisik berpotensi melukai fisik hingga membawa kematian pada seseorang, dalam hal ini Russo dan Pirlott menemukan bahwa dominasi sosial dapat menyebabkan hak laki-laki memiliki keistimewaan yang menempatkan perempuan di belakang laki-laki secara sosial dan politik, sehingga mengarah pada *Intimate Partner Violence* (IPV) dengan memanfaatkan sisi maskulinitasnya untuk mendominasi pasangannya. GBV tersebut disebabkan oleh polemik otoritas laki-laki dengan istri mereka, Scott juga berpendapat bahwa pemukulan terhadap istri dipandang sebagai hal yang diperbolehkan norma di pengadilan Sudan Selatan dan diberi wewenang jika seorang suami menyatakan bahwa dia punya alasan untuk melakukannya memukuli istrinya (Lathan Yusuf, 2022).

b. Gangguan Psikologis

Konflik dalam perang Sudan Selatan merupakan aksi pemberontakan RSF yang menargetkan wanita sebagai kelompok rentan dalam populasi musuh dan kekerasan dipandang sebagai cara untuk mengganggu ‘musuh’. Perempuan di Sudan Selatan menghadapi bahaya yang signifikan dimana kekerasan seksual tersebar luas di medan perang, menurut Ellsberg et al., yang mengamati bahwa faktor risiko terhadap perempuan dan anak perempuan di Sudan Selatan adalah tinggi secara eksponensial (Lathan

Yusuf, 2022). Mereka menyatakan bahwa kekerasan terkait konflik selama puluhan tahun telah menimbulkan dampak yang tidak tanggung-tanggung kerugian terhadap perempuan, akibat norma dan praktik masyarakat patriarki yang menganggap perempuan sebagai properti bisa ditukar dengan barang lain seperti sapi. Kontrol atas perempuan berarti mereka tidak punya kekuasaan atas pilihan reproduksi mereka dan integritas fisik dan seksual mereka dilanggar bentuk-bentuk GBV yang parah dan bahwa kekerasan tersebut memburuk selama masa konflik.

Selain mendapatkan kekerasan fisik, wanita sebagai korban juga mendapatkan efek samping dalam kesehatan mentalnya seperti stress, depresi, traumatis, dan penyakit kronis yang berdampak ke kehidupannya. Dari sudut pandang sosial, SGBV dapat berdampak pada anggota keluarga seperti anak-anak yang harus menyaksikan sendiri kekerasan seksual saat anggota keluarganya diserang. Selain korban, anak-anak yang mengalami kondisi ini tentunya akan trauma yang berdampak negatif pada mental mereka. Banyak penyintas yang berupaya mengakhiri kehamilan akibat pemerkosaan menghadapi hambatan besar dalam mendapatkan layanan aborsi. Para penyintas menggambarkan atau menunjukkan gejala-gejala yang konsisten dengan stres dan depresi pasca-trauma, termasuk pikiran untuk bunuh diri, kecemasan, ketakutan, dan sulit tidur (Human Rights Watch, 2024).

2.1.2. Budaya Patriarki

a. *Gender Norms*

Norma dan struktur patriarki yang mengakar di Sudan Selatan telah menyebabkan ketidakseimbangan yang signifikan antara perempuan dan laki-laki yang ditunjukkan oleh ketidaksetaraan akses terhadap sumber daya dan pengambilan keputusan. Sebagai bagian dari kekerasan kultural, *Gender Norms* yang digeneralisasi praktiknya di Sudan Selatan adalah *bride wealth* atau mahar yang biasanya diberikan dalam bentuk ternak atau uang tunai dibayarkan kepada keluarga perempuan sebagai bentuk tradisi pernikahan. Hal ini dapat membuat remaja putri dipandang sebagai komoditas tidak hanya oleh anggotanya sendiri keluarganya, tetapi juga oleh suami dan keluarganya (South Sudan Crisis Facts - Conflict in South Sudan, 2019).

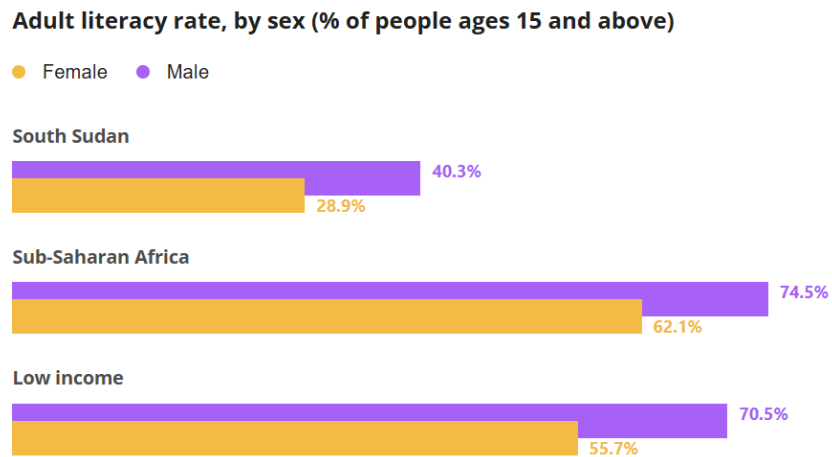
Jika seorang perempuan menemukan dirinya berada dalam situasi yang penuh kekerasan, ia sering kali tidak punya banyak cara untuk mengatasinya, baik melalui cara yang biasa sistem hukum atau dengan mengajukan permohonan kepada keluarganya sendiri – jika dia ingin pergi, keluarganya harus kembali ternak atau uang tunai yang diterima sebagai kekayaan pengantin, yang sering kali terjadi enggan melakukannya (South Sudan Crisis Facts - Conflict in South Sudan, 2019). Tekanan juga dialami oleh pihak laki-laki bahwa mereka tidak akan dianggap maskulin sampai mereka menikah. Perampokan ternak adalah salah satu cara yang bisa dilakukan laki-laki muda agar memperoleh cukup ternak untuk membayar

bride wealth dan menikah. Perempuan dan anak perempuan diajar untuk mengagumi laki-laki yang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan mahar.

b. Ketimpangan dalam Aspek Kehidupan

Ketidakadilan dalam akses literasi memberikan pengaruh pada kehidupan individu atas hambatan meraih kemajuan sosial dan ekonomi. Data angka literasi di Sudan Selatan sudah tergolong berada pada level rendah, namun kesenjangan dari gender menyebabkan peningkatan literasi menjadi tidak merata karena sebagian besar perempuan tidak mendapatkan kesempatan untuk belajar membaca dan menulis.

Gambar 2.4. Angka Literasi Masyarakat Sudan Selatan



Sumber: (World Bank Group, 2025)

World Bank Group menunjukkan sebanyak 40.3% laki-laki di Sudan Selatan yang berumur 15 tahun ke atas dapat membaca dan menulis, sedangkan diusia yang sama hanya 28.9% perempuan dapat melakukan hal

serupa (World Bank Group, 2025). Data yang ditemukan telah menunjukkan bahwa perbedaan kedua gender terlihat cukup signifikan sedari usia dini bahwa laki-laki memiliki *previlege* lebih yang dapat memberikan peluang masa depan yang lebih baik karena kebebasan dalam akses pendidikan. Budaya patriarki di Sudan Selatan disebabkan oleh norma gender yang membuat perempuan tidak diikutsertakan dalam proses pengambilan keputusan maupun politik (Gioveti, 2022). Hal ini dapat dilihat dari perubahan kebijakan nasional *Comprehensive Peace Agreement* (CPA) tahun 2005 tentang kesetaraan gender sejak Sudan Selatan memperoleh kemerdekaan dengan meningkatkan keterwakilan perempuan yang diadopsi sebagai Konstitusi Transisi Republik Sudan Selatan 2011 melalui Majelis Legislatif Sudan Selatan. Konstitusi dikutip pada nomor 16 mengenai Hak-Hak Perempuan bagian 4A tentang partisipasi perempuan setara dengan laki-laki di semua tingkat pemerintahan pada badan eksekutif dan legislatif setidaknya 25% agak memperbaiki ketimpangan representasi kehidupan publik (Constitute, 2025).

Meskipun demikian, perempuan seringkali tidak dapat menuntut akses kepemilikan haknya atas tanah dan aset lainnya baik di dalam keluarga mereka sendiri, maupun di tingkat masyarakat (Logo et al, 2022). Perempuan sebagai objek dapat ditemukan dalam situasi ini karena sering kali diharuskan untuk mengklaim hak-hak tersebut melalui kerabat laki-laki mereka yang pada akhirnya dapat menolak hak perempuan untuk memiliki atau menguasai aset tersebut. Adanya kedudukan perempuan yang tidak

mendapatkan akses sumber daya untuk berinvestasi menyebabkan ketimpangan sosial dengan laki-laki karena bentuk tanggung jawabnya serta kebebasannya yang dibedakan. Sehingga, ketaatan pada norma-norma gender membuat hukum adat sering kali berlaku di atas undang-undang nasional yang membuat kemajuan di tingkat kebijakan tentang kesetaraan dan inklusi gender tidak efektif .

2.2. United Nations Mission In South Sudan (UNMISS)

Setelah Sudan Selatan resmi menjadi bagian dari anggota *United Nations* (UN) pada 14 Juli 2011, referendum telah memberikan pembaharuan dengan mandat berdasarkan UNSC 1996 (2011) setelah kemerdekaan Sudan Selatan untuk misi perdamaian dengan menetapkan tujuan dan kewajiban utama untuk misi negara mendapatkan bantuan kemanusiaan dan penanganan bagi para pengungsi korban kerusuhan. UNMISS mendapatkan perlindungan hukum dalam menjalankan misi karena adanya *The Status of Forces Agreement* (SOFA) sebagai statuta pelindung meliputi:

- a. Pemerintah berjanji menghormati sifat internasional secara eksklusif terhadap personel UNMISS yang mengoperasikan mandatnya kepada masyarakat Sudan.
- b. Personel UNMISS diberikan kekebalan dari yurisdiksi hukum nasional Sudan Selatan terkait tindakan yang dilakukan dalam pelaksanaan mandat misi.

- c. Menjamin bahwa UNMISS dapat membawa, menggunakan, dan mengelola peralatan serta fasilitas yang diperlukan untuk operasional misi (UNMISS, 2011)

Dalam menjalankan tugasnya, UN membentuk organisasi perdamaian dunia dengan fokus penyelesaian misi yang berbeda agar tercapainya implementasi keamanan internasional dan perdamaian sebagai bentuk upaya UN menangani konflik di Sudan Selatan. Tiga program misi perdamaian tersebut antara lain *United Nations Mission in South Sudan* (UNMISS), *United Nations Interim Security for Abyei* (UNISFA) dan UNMISS (Talita et al, 2021).

Badan-badan UN di Sudan seperti *United Nations Women* (UN WOMEN), *United Nations International Children's Emergency Fund* (UNICEF), *The United Nations Integrated Transition Assistance Mission in Sudan* (UNITAMS), dan *United Nations Population Fund* (UNFPA) bekerja sama dengan pemerintah Sudan dan organisasi masyarakat sipil untuk meningkatkan *gender mainstreaming* menggunakan konsep *Women, Peace, and Security* (UN WOMEN, n.d.). Aktivitas ditunjukkan dari UN Women yang berpotensi melakukan pendekatan dengan tiga ruang lingkup yaitu *Non-Governmental Organization* (NGO), organisasi internasional, dan pemerintah dalam rangka meningkatkan *political awareness* di Pelatihan Kepemimpinan Politik untuk Perempuan Muda pada 20-25 Juni tahun 2022 di Juba yang diikuti oleh 41 perempuan muda dari berbagai latar belakang. Dari data yang ditemukan, UN Women bermitra dengan *Ministry of Women's Empowerment, Children and Social Welfare* dengan tujuan meningkatkan kapasitas

perempuan di Sudan Selatan dalam memitigasi konflik dan meningkatkan keterampilan membangun perdamaian dari fokus mediasi, peringatan dini konflik, pemantauan, analisis, dan pelaporan dari perspektif gender dengan memperkenalkan peran *United Nations Security Council* (UNSC) resolusi 1325 (Women's International Peace Centre, 2022).

2.2.1. UNMISS Sebagai Organisasi Internasional

a. Rangkaian *Humanitarian Actors* di UNMISS

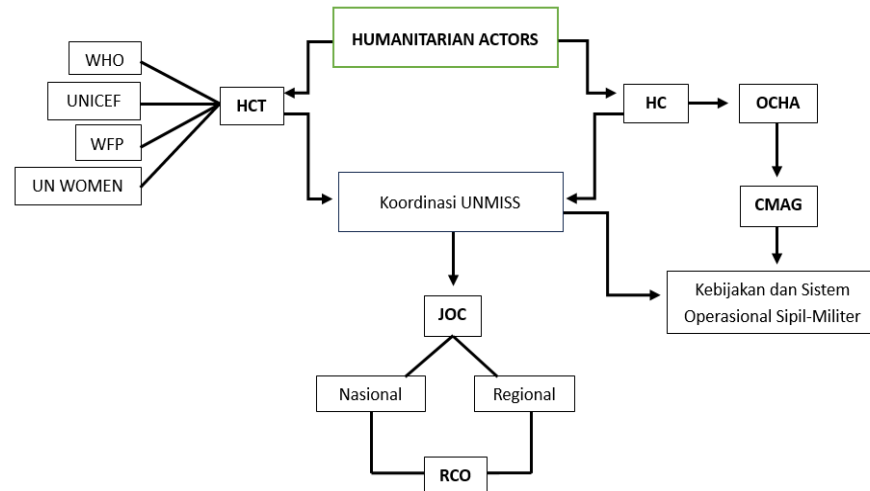
UNMISS melaksanakan tugas-tugas yang melengkapi kehidupan kemanusiaan yaitu sebagian besar menyediakan lingkungan yang aman dalam pemajuan dan pemantauan hak asasi manusia. Berikut 4 pilar misi UNMISS:

- 1) *Protection of Civillians* (PoC): *Peacekeepers* memberi perlindungan ke area tempat penampungan para pengungsi dengan menjaga perdamaian dan menanggulangi SGBV.
- 2) *Creating conditions conducive to the delivery of humanitarian assistance*: *Peacekeepers* bekerja untuk memastikan terpenuhinya bantuan kemanusiaan ke masyarakat yang membutuhkan di Sudan Selatan.
- 3) *Supporting the implementation of the revitalized agreement and the peace process*: Membantu menciptakan perdamaian yang berkepanjangan sebagai mitra yang tidak memihak dalam penyediaan saran dan bantuan teknis.

4) *Monitoring and investigating human rights*: Fokus misi terletak pada pemantauan dan pelaporan SGBV kepada perempuan yang melibatkan teknis bersama organisasi lokal, regional, dan internasional (UNMISS, 2011).

UNMISS didukung oleh *Humanitarian Actors* yang terdiri dari beragam entitas, termasuk badan-badan UN, NGOs dan aktor lainnya. Menurut OCHA, dalam strategi operasional ini bertujuan untuk meminimalkan persaingan dan konflik yang memungkinkan terjadi di wilayah geografis terhadap aktivitas satu sama lain dengan mempertahankan perbedaan yang jelas antara kegiatan kemanusiaan dan politik atau militer. Meskipun mandat dan aktivitas para aktor kemanusiaan berbeda satu sama lain, namun semuanya disatukan oleh komitmen untuk memberikan bantuan kemanusiaan sesuai dengan prinsip-prinsip kemanusiaan, netralitas, ketidakberpihakan dan kemandirian (OCHA, 2023).

Gambar 2.5. Sistem Operasi IPOs Dalam *Humanitarian Actors*



Sumber: Diolah oleh penulis dan bersumber dari OCHA, 2023

Humanitarian Actors mengkoordinasikan aktivitas melalui *Humanitarian Country Team* (HCT) yang terdiri dari *UN Women*, WHO, UNICEF, *World Food Programme* (WFP) dan pendekatan *cluster* di bawah kepemimpinan *Humanitarian Coordinator* (HC) dibersamai oleh *Office for the Coordination of Humanitarian Affairs* (OCHA). Untuk keberjalanan HC, OCHA berperan sebagai *platform* komunitas kemanusiaan untuk penghubung dan koordinasi antara UNMISS dan *Humanitarian Actors* pada umumnya dan koordinasi khusus sipil-militer. *UN Women* menyatakan bahwa OCHA diperkirakan mendata sebanyak 716.508 warga sipil telah mengungsi akibat kekerasan bersenjata. Dari jumlah tersebut, 75.308 orang mencari perlindungan dan perlindungan UNMISS (UN WOMEN, n.d.). *Civil-Military Advisory Group* (CMAG) yang diketuai oleh OCHA dan

bagian UNMISS yang relevan memberikan saran kebijakan dan operasional mengenai masalah sipil-militer dan masalah koordinasi UNMISS kepada HCT dan HC. Dalam hal ini tentunya, OCHA ditunjuk melibatkan misi antara Pasukan IPOs dengan para aktor kemanusiaan di tingkat nasional dan negara bagian. Implikasi OCHA dengan UNMISS dilakukan melalui *Joint Operations Center* (JOC) sebagai cakupan di tingkat nasional dan di tingkat negara bagian di dimana *Resident Coordinator's Office* (RCO) biasanya bertindak (OCHA, n.d.).

Tabel 2.1. Peran *Humanitarian Actors* di UNMISS

<i>Actors</i>	Penugasan
HC dan HCT	Bekerja sama merumuskan respons kemanusiaan yang efektif
OCHA	Menyediakan <i>platform</i> analisis situasi dan memastikan keselarasan antara aktor-aktor kemanusiaan
JOC	Meningkatkan operasional lapangan dengan fokus pada keselamatan dan keberlanjutan operasi bantuan
RCO	Memastikan koordinasi yang harmonis dalam dengan tujuan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan
CMAG	Memberikan rekomendasi strategis kepada negara yang mengalami krisis

Sumber: Diolah oleh penulis dan bersumber dari OCHA, 2023

b. Pengerahan IPOs dalam UNMISS

Berdasarkan UNSC Resolusi 1325 (2000) yang membahas WPS, UN Women menyatakan *Humanitarian Action* dibentuk dalam gerakan inklusif kesetaraan gender dengan mengumpulkan komitmen-komitmen terkait agenda WPS mengimplementasikan “*action*” untuk menutup kesenjangan diantara personel perempuan dan laki-laki (UN Women, 2020). Dalam konteks *peacekeeping*, konflik dapat dilihat dengan cara pandang dan pemahaman berbeda dari laki-laki dan perempuan. Oleh karenanya, proses eksekusi integrasinya sebagaimana peran *gender perspective* memberikan pengaruh yang berbeda di dalam operasi-operasi perdamaian UN (Hutabarat, 2017). Sehingga UN memperluas tujuannya dalam keputusan yang telah disebutkan di UNSC resolusi 2538 bahwa personel perempuan dapat meneguhkan pendekatan holistik dalam *peacekeeping* UN, terlebih dalam konflik Sudan banyak memakan korban perempuan.

Perempuan di Sudan Selatan menjadi masyarakat yang paling dirugikan dan tereliminasi dalam pemberdayaan ekonomi dan pembangunan keberlanjutan (UN Women, 2022). Selain itu, stigma dan budaya patriarki di Sudan dapat memperkuat ketidaknyamanan korban perempuan untuk melaporkan kasus kekerasan seksual kepada IPOs laki-laki yang tidak cukup sensitif terhadap trauma yang dialami korban perempuan terkait kekerasan seksual. Dalam hal ini, menurut Rudberg laki-laki kurang berpengalaman dalam menangani kasus kekerasan seksual

dibandingkan dengan IPOs perempuan yang lebih dapat memahami emosional, kondisi kesejahteraan fisik, spiritual, dan sosial karena kesamaan gender (Rudberg, 2023). Maka, dengan dukungan resolusi tentunya *peace, security and humanitarian actions* di Sudan Selatan dapat dibentuk berdasarkan kepemimpinan dan partisipasi perempuan.

Menurut Sharland, resolusi konsep WPS dielaborasi sebagai operasi *peacekeeping* yang bertanggung jawab dalam menindaklanjuti agenda, peran tersebut diartikulasikan oleh *Secretary General* sebagai *Action for Peacekeeping (A4P) initiative*. Komitmen-komitmen WPS dalam Deklarasi A4P *Initiative* meliputi:

- 1) Terjaminnya partisipasi perempuan yang setara dalam proses *peacekeeping*
- 2) Perspektif gender diintegrasikan ke segala implementasi perencanaan secara sistematis
- 3) Jumlah personel perempuan dalam *peacekeeping* ditambahkan dalam semua tingkatan
- 4) Perlindungan perempuan dan anak merupakan bagian dalam pendekatan *peacekeepers* untuk memberikan rasa aman (Sharland, 2021).

2.2.2. Efektivitas Program UNMISS

Menurut UNMISS News, UNMISS menjalankan *Quick Impact Projects* dengan membangun hubungan bersama masyarakat lokal untuk

memperoleh hasil efesiensi nyata di Sudan Selatan dalam pendidikan, kesehatan dan keamanan infrastruktur. Sejak 2013, ditunjukkan bahwa lebih dari 30 *Quick Impact Project* sudah diimplementasikan meliputi penindaklanjutan fasilitas kepolisian, sanitasi air bersih, kontruksi rumah sakit dan sekolah, bahkan dukungan pembangunan perdamaian. Contoh eksekusinya pada Februari 2015 di Kota Magwi lebih dari 1.500 rumah menerima *Solar-Powered Water System* yang diterapkan oleh UNMISS, UN Habitat, dan NGO *The Association of Volunteers in International Service* (AVSI) Italia. Sistem proyek ini meningkatkan kualitas air minum, melakukan mitigasi kekurangan air, dan mendorong proteksi keamanan yang lebih tinggi pada perempuan saat mengambil air mengingat kondisi konflik menargetkan sebagian besar adalah perempuan (UNMISS, 2015).

Dalam keberjalanan misi perdamaian, *United Nations Police* (UNPOL) ditugaskan untuk meningkatkan perdamaian dan keamanan internasional negara yang tengah berkonflik, pasca-konflik dan pada keadaan krisis lainnya seperti halnya di UNMISS. UNPOL bekerja bersama militer dan *peacekeepers* sipil dengan tujuan melindungi wilayah masyarakat sebagai pembangunan perdamaian dan melaksanakan mandat menjamin lingkungan aman masyarakat Sudan Selatan yang mencari perlindungan ke *Protection of Civillians* (PoC), termasuk upaya mencegah terjadinya SGBV dengan mempromosikan hak asasi manusia yang melibatkan pelayanan komunitas. Upaya tersebut ditunjukkan saat UNPOL melakukan sebanyak 60 patroli di Sudan Selatan setiap hari. Untuk membangun kapasitas dan

efektivitas, UNPOL juga mengerahkan bantuan teknis dan nasihat sejalan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan hukum humaniter internasional (UNMISS, n.d.).

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan IPDA Hilman Lasmana selaku narasumber yang bertugas sebagai *Peacekeeping Forces* UNMISS di Malakal tahun 2019-2021 menyatakan terkait penanganan SGBV khususnya dalam UNPOL *Team Leader* di daerah Malakal, bahwa Sudan Selatan merupakan negara yang unik sebab tradisi perempuan yang menjadi tulang punggung keluarga untuk memenuhi kehidupan sehari-hari, oleh karena itu beban perempuan lebih berat dari laki-lakinya yang cenderung bersantai tanpa melakukan kegiatan telah menjadi peluang terjadinya kekerasan terhadap perempuan sebagai sebuah budaya impunitas. Sehingga, dalam hal ini perlu pendampingan dari masyarakat lokal juga serta pemangku-pemangku di PoC agar tercapainya koordinasi tim SGBV untuk meraih para korban terkait kendala maupun kebutuhan mereka. UNPOL memberikan dukungan *South Sudan National Police Services* (SSNPS) melalui implementasi *Confidence and Trust building Policing Strategy* (CTBPS) yang dirancang untuk mendukung kembalinya para pengungsi kembali ke rumah mereka dengan aman. Berikut rangkaian UNMISS *police* yang telah dilaksanakan:

- 1) Pembentukan 3 pos polisi yang didanai oleh UNMISS *Quick Impact Projects* untuk fasilitas pengungsi internal di area Juba meliputi Khor Williams, Mia Saba dan Hai Tarawa
- 2) Meningkatkan kepercayaan masyarakat di SSNPS dengan menyediakan 777 panggilan darurat untuk mengurus keluhan publik dan masalah keamanan di Juba
- 3) Sensititasi SNPSS dalam koordinasi operasional perlindungan warga sipil, hak asasi manusia dan gender di 10 negara bagian (UNMISS, n.d.).

2.3. Agenda WPS dalam *Peacebuilding* UNMISS

Konflik regional yang terjadi di Afrika Timur memainkan peran penting dalam prospek perdamaian dunia. Demokrasi dan konflik sipil adalah pendorong utama terorisme di Sudan Selatan yang dilanda perang saudara dan pemberontakan lainnya yang menimbulkan ketidakstabilan regional, sehingga diperlukan upaya pemeliharaan perdamaian internasional untuk mengurangi konflik-konflik tersebut. Mengingat pentingnya jumlah konflik sipil dalam menyebabkan terorisme di wilayah tersebut, maka pemeliharaan perdamaian berfungsi sebagai tindakan kontraterorisme (Kim, W., & Sandler, T., 2020). Dalam hal ini, UNMISS dapat dianggap sebagai salah satu kontributor di antara banyak pihak yang bekerja sama untuk mengakhiri perang saudara dan meletakkan fondasi perdamaian agar bertahan lama.

UNPOL (*United Nations Police*) sebagai badan di bawah UN yang bertanggung jawab untuk menerjunkan IPOs (*Individual Police Officers*) dalam misi-misi perdamaian seperti di Sudan Selatan, sedangkan UNMISS (*United Nations Mission in South Sudan*) merupakan misi perdamaian UN yang mencakup UNPOL dan pasukan militer lain untuk mendukung keamanan, stabilitas, dan pembangunan di negara. Pada umumnya, IPOs merupakan personel tidak bersenjata yang sering mendukung pengembangan inisiatif kepolisian masyarakat termasuk forum masyarakat, program pencegahan kejahatan dan penanggulangan kejahatan yang melibatkan anggota masyarakat dengan memberikan dukungan korban. Menurut Kumalo, IPOs membantu menjembatani kesenjangan antara masyarakat dan polisi di negara bagian sebagai tuan rumah melalui pendidikan masyarakat dan pembangunan kepercayaan (Kumalo, 2021). Dalam peran tersebut, mereka berkontribusi pada pengumpulan informasi, analisis, peringatan dini, serta pemantauan dan tindak lanjut atas insiden.

“Women bring a different perspective to peacekeeping operations. If we have women on patrol, we are able to access different areas of the communities and gather different information. We gain a different perspective on what the requirements are different security concerns for women that may not be of concern to men.” – Stelzer (Security Women, 2018)

Peacekeepers UN di Sudan Selatan memainkan peran penting dalam mengumpulkan informasi dari masyarakat dan membantu polisi setempat untuk menyelidiki kasus SGBV. Menurut Pak Hilman, ditemukan faktor bahwa IPOs laki-

laki sulit memberikan rasa nyaman untuk menjadi tempat bercerita meluapkan sesuatu apa yang diinginkan korban, bahkan rentan emosional yang menyebabkan keributan dalam penanganan. Selain itu, adanya keterbatasan dalam bahasa mengingat masyarakat Sudan Selatan menggunakan bahasanya sendiri dan bukan Bahasa Inggris (Lasmana. H, wawancara pribadi, 20 Maret 2025). Hal tersebut sejalan dengan laporan Mayor Bettina Stelzer pada 9 Oktober 2018 yang bertugas di Desa Nakitun berlokasi di pinggir Juba sebagai penasihat gender militer untuk UNMISS. Argumen ini diperkuat oleh Kasumi Nishigaya yang menjabat sebagai penasihat gender senior UNMISS bahwa perempuan yang sering ditemui pasukan *peacekeepers* UNMISS lebih gemar berbicara dengan personel perempuan karena ditemukan fakta di beberapa komunitas konservatif dapat dianggap tidak pantas bagi perempuan untuk berbicara dengan laki-laki yang tidak mereka kenal, oleh karena itu jarak budaya di antara *peacekeepers* dan korban itu telah diisi oleh personel perempuan guna membantu polisi Sudan Selatan di seluruh negeri untuk mencatat dan menyelidiki kasus-kasus kekerasan seksual dan SGBV (SECURITY WOMEN, 2018).

Dalam mengatasi komunitas yang konservatif di lapangan, Pak Hilman melakukan kerja sama dengan pimpinan yang diseniorkan dan dianggap memiliki tanggung jawab lebih dengan mengajak kegiatan yang diadakan oleh NGO seperti WFP, WHO, UNICEF, sehingga pemberitahuan informasi terkait kejadian atau kebutuhan apapun itu tersampaikan dan dilakukan secara sistematis karena keterlibatan penerjunan langsung ke masyarakat lokal (Lasmana. H, wawancara pribadi, 20 Maret 2025). IPOs perempuan sering dipandang sebagai *role*

model selama bersosialisasi oleh masyarakat dengan menggunakan pendekatan berbasis trauma yang memberikan rasa nyaman akan interaksi tersebut. Hal ini disampaikan oleh Bapak Leonard Felix Hutabarat selaku Diplomat Ahli Madya Kementerian Luar Negeri yang memiliki pengalaman dalam penugasannya di UN *Peacekeeping* penugasan *United Nations Interim Force in Lebanon* (UNIFIL) tahun 2006 (Hutabarat. L, wawancara pribadi 6 Maret 2025).

Maka dari itu, untuk melatih kemampuan dalam penanganan korban dilakukan peningkatan *Capacity Building* IPOs berupa pelatihan rutin selama 3 bulan sekali mengenai SGBV dari tim UNPOL yang bertanggung jawab dari divisi kekerasan terhadap wanita dan anak. Kegiatannya dapat berupa mengundang narasumber seperti *expertise* SGBV atau *ex-IPOs* yang tercatat memiliki *track record* yang baik dalam penanganan tersebut (Lasmana. H, wawancara pribadi, 20 Maret 2025), hal ini dilakukan sebagai motivasi bagi polisi yang lain dalam menjalankan misi hingga mengundang UNPOL baik polisi laki-laki maupun perempuan untuk diberikan kesempatan mengikuti kegiatan bersama *Non-Governmental Organization* (NGO). Menurut pernyataan Pak Hilman, berdasarkan hasil observasi pengalamannya dalam penugasan di lapangan menunjukkan bahwa penanganan SGBV khususnya dalam UNPOL *Team Leader* di daerah Malakal, UNMISS menjalankan mandat *Women, Peace and Security* (WPS) dengan mengerahkan divisi khusus yaitu SGBV *Forces* yang terdiri dari polisi perempuan dan laki-laki sebagai penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Saat terjadinya kekerasan terhadap wanita dan anak, maka mereka akan mengirim tim awal untuk melaksanakan pengamanan TKP untuk meminta bantuan kepada tim

penanganan memberikan penyuluhan dan pengamaman terhadap korban dan (Lasmana. H, wawancara pribadi, 20 Maret 2025).

2.3.1. Pengaruh Resolusi *United Nations* Terhadap *Peacekeepers*

Berdasarkan keputusan UN, *Secretary General* mengusulkan kerangka strategis untuk memandu perdamaian implementasi resolusi UN selama 10 tahun ke depan dalam rangka peringatan Resolusi UNSC 1325 (2000) tentang *Women, Peace and Security* (WPS) yang ke-10. Agenda tersebut memiliki tujuan memperkuat dukungan terhadap implementasi nasional, memperkuat landasan yang untuk menilai kemajuan dan meningkatkan koordinasi seluruh sistem mengenai WPS (United Nations, 2020).

Tabel 2.2. Perbedaan Implikasi Kebijakan Resolusi UNSC Terhadap Perempuan

Kebijakan	Kerangka Kerja
Resolusi 1325 (2000)	<i>1. Prevention:</i> Pencegahan konflik segala bentuk kekerasan terhadap perempuan di masa konflik dan pasca-situasi konflik. <i>2. Participation:</i> Perempuan berpartisipasi secara setara dengan laki-laki dan kesetaraan gender dipromosikan dalam perdamaian dan keamanan dalam proses pengambilan keputusan di tingkat nasional, lokal, regional dan internasional. <i>3. Protection:</i> Hak-hak perempuan dilindungi dalam situasi yang terkena dampak konflik.

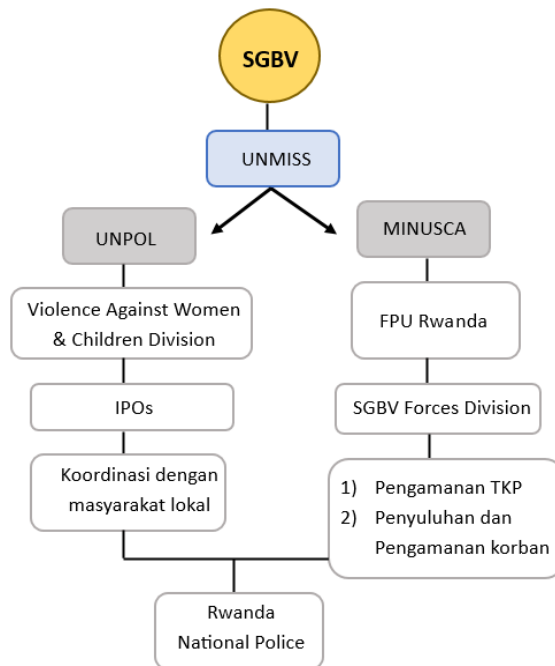
	<i>4. Relief and Recovery:</i> Kebutuhan bantuan khusus untuk perempuan terpenuhi, serta kapasitas personel perempuan untuk bertindak memberikan bantuan dan pemulihan diperkuat dalam situasi konflik dan pasca-konflik.
Resolusi 2538 (2020)	<i>1. Recognizing:</i> Keseimbangan antara laki-laki dan perempuan dalam <i>peacekeeping</i> dengan komitmen meningkatkan jumlah personel perempuan di semua tingkatan termasuk posisi senior <i>2. Noting with appreciation:</i> Inisiatif “<i>Action for Peacekeeping (A4P)</i>” yang memperluas kepentingan dari agenda WPS <i>3. Stressing:</i> Akses yang sama kepada personel perempuan dalam pendidikan, pelatihan dan pengembangan kapasitas, peluang jaringan untuk lebih memahami dan mengatasi hambatan partisipasi perempuan dalam pemeliharaan perdamaian <i>4. Welcoming:</i> Jumlah perempuan di militer, polisi dan sipil yang ditugaskan di UN lebih besar dalam operasi penjaga perdamaian dengan mencatat pentingnya meningkatkan jumlah perempuan dalam posisi kepemimpinan.

Sumber: Diolah oleh penulis dan bersumber dari United Nations, 2020 dan UNSC, 2020

Perbedaan terletak pada resolusi 1325 yang mempromosikan keamanan melalui agenda *Women, Peace, and Security* (WPS), sedangkan resolusi 2538 memperluas fokus dari Resolusi 1325 dengan penekanan pentingnya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual terkait konflik, serta peran perempuan dalam memerangi ekstremisme dan terorisme (Komnas Perempuan, 2020). Oleh karena itu, menurut Darming hampir semua misi perdamaian UN membahas resolusi ini dalam perpanjangan *peacekeeping operations* seperti di UNMISS, *United Nations Hybrid Operation in Darfur* (UNMID), *United Nations Interim Force in Lebanon* (UNFIL), *Multidimensional Integrated Stabilization Mission in the Central African Republic* (MINUSCA) (Darming, 2021).

Bentuk penanganan SGBV yang terjadi di Sudan Selatan sebagai bagian dari konsolidasi feminis untuk merealisasikan resolusi tersebut membutuhkan bantuan dari berbagai pihak, oleh karenanya UNPOL tidak dapat bergerak sendiri dalam mengarahkan personel mengingat lokasi kekerasan berada di wilayah yang cukup rentan. Sehingga perluasan mandat terhadap *peacekeeping operations* melibatkan pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti kasus SGBV, berikut tatanan kelola berdasarkan hasil wawancara Pak Hilman selaku *United Nations Police Team Leader Malakal Forces Officers* pada tahun 2019-2020:

Gambar 2.6. Tata Kelola SGBV di UNMISS



Sumber: Diolah oleh penulis dan bersumber dari wawancara pribadi dengan Lasmana. H, 20 Maret 2025

Pada dasarnya, laporan atas tindakan SGBV yang terjadi di UNMISS ditangani oleh Divisi SGBV *Forces* yang berada di *Formed Police United* (FPU) Rwanda karena UNPOL hanya memiliki Divisi Kekerasan Terhadap Wanita dan Anak, sehingga terjalinnya kerja sama dengan *Rwanda Police* yang mempermudah mobilisasi pendampingan berkaca dari UNPOL yang tidak dapat bergerak bebas ke lokasi. *Peacekeeping Operations* tersebut dilaksanakan atas kontribusi dari MINUSCA, dimana dalam misi perdamaianya dapat mengarahkan *Formed Police United* (FPU) sebagai unit personel dari negaranya sendiri sehingga memiliki kapabilitas dalam berkomunikasi dengan baik ke masyarakat, FPU memiliki divisi

SGBV *Forces* yang bersenjata dengan tujuan melaksanakan *public order management* dalam pengamanan Tempat Kejadian Perkara (TKP) dan melakukan penyuluhan serta pengamanan terhadap korban. Dari kasus ini, *Rwanda National Police* memiliki kewenangan dalam mengirim personel ke dalam suatu misi UN baik secara IPOs yaitu individu, maupun dalam bentuk unit seperti FPU (UNMISS, 2015). Lain dengan FPU, IPOs berasal dari multinasional negara yang bertugas membangun hubungan bersama penduduk maupun komunitas lokal terkait kekerasan dengan *capacity building* hingga *community policing* sebagai aparat keamanan yang tidak bersenjata (*Lasmana. H, wawancara pribadi, 20 Maret 2025*). Selain UNPOL dan FPU, bagian lain yang dilibatkan dalam penanganan SGBV antara lain pimpinan dari masing-masing lokasi di Sudan Selatan.

Dalam rangka menanggapi kasus kekerasan, UNMISS pada Desember tahun 2018 mengerahkan total Individual Police Officers (IPOs) sebanyak 1.403 dengan jumlah IPOs perempuan sebanyak 95 orang (6,77%) dan IPOs laki-laki sebanyak 1.308 orang (93,23%) (Norwegian Institute of International Affairs, 2019). Setelah pelaksanaan mandat dari resolusi 2538 pasukan UNPOL di UNMISS yang dikerahkan pada tahun 2020 terdiri dari sejumlah 1.484 IPOs yang terdiri dari 1.360 IPOs laki-laki (91,65%) dan 124 adalah IPOs perempuan (8,35%) (UNITED NATIONS, 2021). UN telah mendorong dan mengadvokasi pengerahan perempuan ke beragam misi perdamaian lebih dari 85.000 pasukan penjaga perdamaian perempuan UN merupakan hampir 5% dari kontingen militer, 11% dari unit polisi yang dibentuk, dan 34% dari personel peradilan dan masyarakatan yang disediakan pemerintah dalam misi pemeliharaan perdamaian (Better World

Campaign, 2025). Pada tahun 2020, jumlah total 1.484 IPOs di UNMISS sedikit menurun dibandingkan tahun 2018. Namun, terdapat peningkatan persentase IPOs perempuan, yaitu dari 6,77% di tahun 2018 menjadi 8,35% di tahun 2020. UNPOL meluncurkan *Global Effort* untuk merekrut lebih banyak petugas polisi perempuan ke dalam dinas kepolisian nasional dan ke dalam operasi kepolisian UN di seluruh dunia dengan memiliki target tahun 2028 untuk perempuan yang bertugas di unit-unit polisi yang dibentuk sebanyak 20%, dan 30% untuk IPOs perempuan (United Nations Peacekeeping, et. al).

2.3.2. Prevelansi Kasus SGBV dengan Kapasitas IPOs

Pada 2017 *Secretary General* mengeluarkan *Uniformed Gender Parity Strategy* (UGPS) merupakan target kesetaraan gender yang diupayakan oleh *Troop-Contributing Countries* (TCCs) dengan pemantauan dari *webstite Data Protection Officer* (DPO) pada setiap pengerahan personel perempuan di setiap bulannya. Pada dasarnya sejak Resolusi UNSC 1325 yang membahas peningkatan perempuan dalam misi perdamaian sudah meliputi UGPS untuk mencapai target IPOs sebanyak 30% pada tahun 2028 (The Elsie Initiative Fund, 2025).

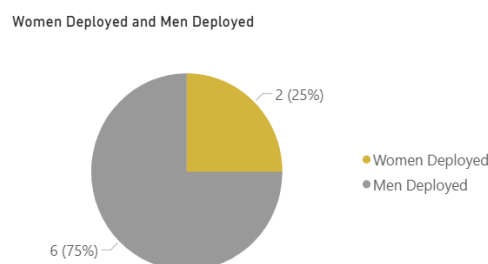
Gambar 2.7. DPO Pengerahan IPOs perempuan



Sumber: (The Elsie Initiative Fund, 2025)

Namun, tabel angka pencapaian diatas tidak sesuai dengan perbandingan target yang telah diusulkan, sehingga fenomena menunjukkan transformasi pergerakan personel lambat dan rendahnya jumlah IPOs perempuan yang dikerahkan. UGPS dibentuk dengan tujuan mengatasi bias secara tidak langsung dalam perekrutan dan menciptakan lingkungan kerja yang kondusif dan aman, dalam hal ini UNPOL berperan menyediakan detail angka petugas polisi yang ditugaskan dalam UN *Peacekeeping*. Selain UGPS, *Secretary General* berupaya meluncurkan *Action for Peacekeeping (A4P) Initiative* pada 2018 yang berkomitmen dalam peningkatan kapasitas jumlah perempuan sipil maupun berseragam dalam *peace operation* di semua tingkatan dan posisi-posisi penting. Dalam hal menciptakan *capacity building* tersebut, UNPOL telah bekerja sama dengan negara-negara anggota untuk mengembangkan pelatihan bagi perempuan guna membantu meningkatkan jumlah polisi perempuan yang dikerahkan dalam operasi perdamaian (Kumalo, 2021). Sehingga *Capacity Building* yang dikerahkan oleh UNPOL ke setiap negara anggota memiliki tujuan untuk mengembangkan pelatihan bagi perempuan demi meningkatkan pengerahan jumlah polisi pengerahan dalam misi perdamaian.

Gambar 2.8. *Gender Statisc IPOs*



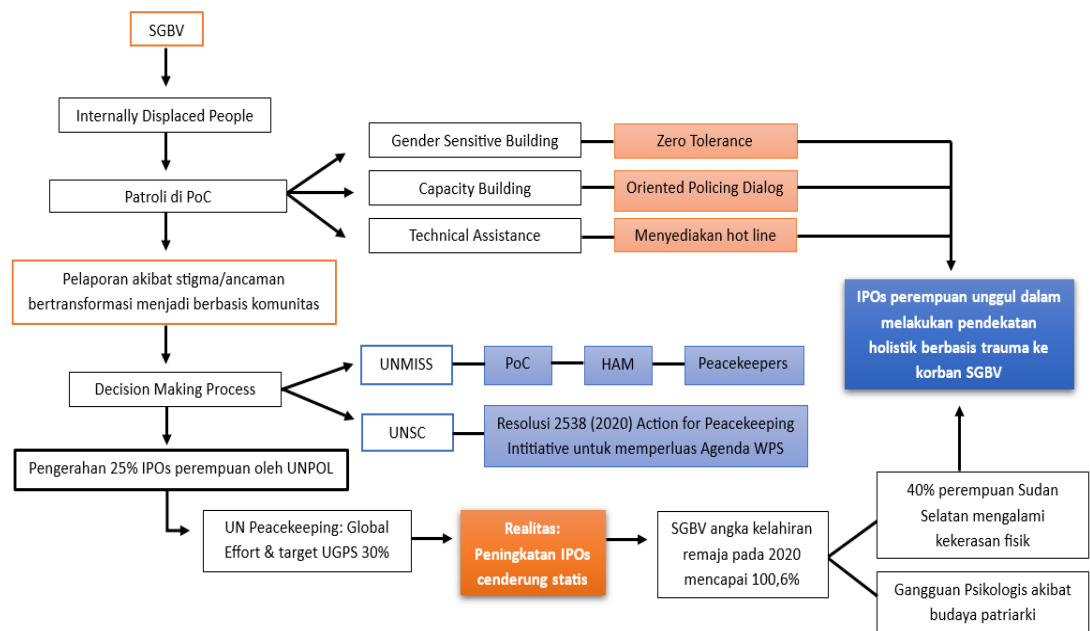
Sumber: (The Elsie Initiative Fund, 2025)

Menurut *website The Elsie Initiative Fund, Data Gender Statistics* di atas berasal dari *United Nations Peace Security Data Hub* yang menunjukkan bahwa target UGPS belum sepenuhnya tercapai dalam pengerahan personel kepolisian di Afrika Selatan penugasan di UNMISS dikarenakan angka kategori IPOs perempuan hanya sebanyak 25%, sedangkan IPOs laki-laki 75% (The Elsie Initiative Fund, 2025). Berkaca pada wawancara yang telah dilaksanakan oleh penulis, Pak Leonard menyatakan bahwa populasi di Sudan Selatan pada tahun 1950-an sebanyak 2,5 juta penduduk dan pada tahun 2024 terjadi kenaikan menjadi 10 jt lebih penduduk. Dengan terjadinya konflik di Sudan Selatan, maka memberikan pengaruh pada banyaknya populasi yang menyebabkan *Internally Displaced People* (IDPs) mencari perlindungan ke negara bagian, sejalan dengan pernyataan Pak Hilman bahwa exodus dari Negara Ethiopia ke Sudan Selatan telah bergabung ke PoC sebagai orang yang merasa menjadi korban meski bukan bagian dari masyarakat Sudan Selatan. Sehingga deportasi mereka akan sangat sulit diproses karena tata kelola pemerintahan yang kacau, oleh karenanya deportasi hanya dipegang oleh militer atau kepolisian (Lasmana. H, wawancara pribadi, 20 Maret 2025).

Aksi untuk menangani arus balik penduduk atas fenomena tersebut membutuhkan proses dari PoC untuk meyakinkan tidak adanya resiko konflik. Peran UN *Peacekeeping* dalam mendorong *gender sensitive building* ditunjukkan dalam memberikan advokasi “*zero tolerance*” terhadap SGBV di lingkungan masyarakat. Menanggapi eskalasi kasus, Pak Leonard menyatakan bahwa misi perdamaian membutuhkan personil perempuan yang banyak untuk perlindungan warga sipil, stabilitas keamanan dan perlindungan hukum (Hutabarat. L,

wawancara pribadi, 6 Maret 2025). Doktrin konflik bersenjata sebagai senjata perang yang diikuti ancaman SGBV untuk memberikan strategi intimidasi dan penghancuran lawan dengan melakukan pemerkosaan bahkan perbudakan masal telah memberikan dampak kehidupan sosial yang tidak stabil. Sehingga, respon UNMISS adalah menambahkan kapasitas personil IPOs Sudan Selatan, tokoh-tokoh perempuan dilibatkan dalam perlindungan keamanan dengan tujuan meningkatkan kepercayaan pada korban dalam melapor kasus SGBV yang menyebabkan terjadinya perubahan berbasis komunitas dan gender dalam penanganan kasus yang terbatas di kepolisian.

Gambar 2.9. Perkembangan *Role* IPOs



Sumber: Diolah oleh penulis dan bersumber dari wawancara pribadi

dengan Lasmana. H, 20 Maret 2025

Prevelansi kasus kekerasan yang dialami korban menjadi lebih mudah di akses karena penguatan peran IPOs memberikan keterikatan pada perempuan di PoC. Terjadinya perubahan pendekatan dari aspek keamanan ke komunitas yang terlihat dari awal mula patroli keamanan hanya diimplemetasi di PoC, namun pada 2021 UN *Police* melakukan pendekatan “*oriented policing dialog*” dengan pelatihan kepada masyarakat lokal untuk pencegahan mengurangi stigma terhadap korban. Terjadinya peningkatan kapasitas dari polisi lokal dengan latihan intensif yang lebih proposional dalam menangani korban. Mekanisme pelaporan akibat stigma ancaman beralih menjadi pelaporan berbasis komunitas karena menyediakan *hot line* khusus bagi korban (Hutabarat. L, wawancara pribadi, 6 Maret 2025). Dalam hal ini ditemukan tantangan IPOs perempuan terletak diketerbatasan kapasitasnya sehingga memberikan pengaruh otoritas dalam menangani kasus. Meskipun IPOs laki-laki kurang sensitif dengan kondisi korban, mereka memiliki penanganan kapasitas operasional dalam mengakses keamanan lebih luas karena dominasi keamanan laki-laki di Sudan Selatan memudahkan mereka mudah untuk bekerja sama dengan polisi lokal.